



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAENAL ABIDIN
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK : 823768

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.180.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah Seluas 1.225 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 134.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS F700RG - TX MT / MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 1.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 1.250.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.316.250.000

III. HUTANG

Rp. 174.013.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.142.237.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.